

Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi

Cahaya Latifa¹, Destira Putri Andita², Muhammad Farrel Shidqi³, Faisa Syahda Aufa⁴, Oliviani Yulianti⁵, Ratu Salza Alya Sabila⁶, Khoirul Irpani⁷, Fadia Febrianti⁸, Deris Desmawan⁹
Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

pernikahan dini
kemiskinan
pendidikan
human capital
India

ABSTRACT

Pernikahan dini di India merupakan isu serius yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, sering kali terjadi tanpa persetujuan penuh dari anak. Praktik ini berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional, menghambat akses pendidikan dan Kesehatan anak-anak. Dengan lebih dari 1,5 juta kasus pernikahan anak perempuan setiap tahun, India menyumbang sepertiga dari total pengantin anak secara global. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya terhadap Pendidikan serta kualitas hidup anak-anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier untuk menguji pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi pada siklus kemiskinan antar generasi, mengurangi potensi individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan menjadi dasar untuk upaya pengurangan pernikahan dini, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Child marriage in India is a serious issue involving individuals under the age of 18, often occurring without the full consent of the child. This practice negatively impacts the quality of human resources and national productivity, hindering children's access to education and health. With over 1.5 million cases of child marriage among girls each year, India accounts for one-third of the total child brides globally. This study aims to understand the factors causing child marriage and its impact on education and the quality of life of children. The method used is a quantitative approach with linear regression analysis to test the influence of child marriage on poverty and economic growth. The results indicate that child marriage contributes to the intergenerational cycle of poverty, reducing individuals' potential to participate in economic development. This research is expected to provide a clear picture of the challenges faced and serve as a basis for efforts to reduce child marriage, allowing children better opportunities for their future.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Deris Desmawan

Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, UNTIRTA

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten, 42163

Email: humas@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 18 tahun. Dalam praktiknya, pernikahan dini sering terjadi tanpa persetujuan penuh dan kesadaran dari pihak anak, karena adanya tekanan dari orang tua, budaya, atau kondisi ekonomi (Jiwami, 2019). Praktik pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi anak, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (*Human Capital*) dan produktivitas nasional. Anak-anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan akan tumbuh dengan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Gary Becker, pendidikan dan kesehatan

merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas ekonomi individu. Namun, pernikahan dini justru menghambat proses investasi tersebut.

Di negara berkembang, praktik ini masih sering ditemukan, termasuk di India, dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. UNICEF (2021) menunjukkan bahwa India menyumbang sekitar 1,5 juta kasus pernikahan anak perempuan setiap tahun, menjadikannya rumah bagi sepertiga dari total pengantin anak secara global. Berdasarkan temuan dari *National Family Health Survey* (NFHS-4) tahun 2015–2016, sekitar 27% perempuan India usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi di beberapa wilayah seperti Bihar (42,5%), West Bengal (41,6%), dan Jharkhand (37,9%) (Paul, 2020). Meski tren nasional menunjukkan penurunan, pernikahan anak tetap menjadi praktik yang umum, terutama di wilayah timur India dan komunitas yang mengalami keterbatasan pendidikan serta kesejahteraan ekonomi.

Pernikahan anak di India tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki dan ketimpangan gender, tetapi juga oleh kemiskinan dan rendahnya akses terhadap pendidikan. Dalam banyak kasus, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga menikahkan mereka dipandang sebagai solusi jangka pendek atas kesulitan finansial. Hal ini berdampak serius terhadap pembangunan ekonomi negara, karena anak perempuan yang menikah muda cenderung putus sekolah, tidak bekerja, dan mengalami kehamilan dini yang berisiko tinggi, sehingga memperkuat rantai kemiskinan antar generasi (Basha, 2016).

Selain menghambat perkembangan individu, pernikahan dini juga berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional. Anak-anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan akan tumbuh dengan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mereka cenderung memiliki keterampilan yang rendah, terbatas dalam pilihan kerja, serta tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin menuntut. Akibatnya, negara kehilangan kontribusi potensial dari kelompok usia produktif, yang seharusnya menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di India serta dampaknya terhadap pendidikan dan kualitas hidup anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi produktivitas dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan menjadi dasar untuk upaya-upaya yang efektif dalam mengurangi pernikahan dini, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

KAJIAN TEORI

Landasan Hukum Pernikahan Dini di India

Secara hukum, India telah menetapkan aturan tegas untuk melarang praktik pernikahan dini melalui *The Prohibition of Child Marriage Act* tahun 2006, yang menentukan usia minimal pernikahan adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Namun, implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi rendah dan adat istiadat yang kuat. Di banyak komunitas pernikahan dini dianggap sebagai tradisi yang harus dijalankan demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari beban ekonomi. Akibatnya, aturan hukum seringkali tidak dipatuhi sepenuhnya. Kondisi ini mencerminkan adanya jurang antara peraturan formal dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.

Teori Human Capital

Teori Human Capital yang diperkenalkan oleh Gary Becker (1993) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, keterampilan, dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu dalam jangka panjang. Namun, pernikahan dini secara langsung menghambat investasi tersebut, terutama bagi anak perempuan. Ketika mereka dinikahkan dalam usia yang masih sangat muda, mereka cenderung

tidak menyelesaikan pendidikan formalnya dan kehilangan akses terhadap pelatihan atau pengalaman kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya kapasitas mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam sektor ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pendekatan *Capability*

Amartya Sen dalam pendekatan *capability*-nya menekankan pentingnya kebebasan individu untuk memilih kehidupan yang ia nilai berharga. Ketika anak perempuan dipaksa menikah di usia muda, maka ruang pilihan mereka untuk mengejar pendidikan, mengembangkan keterampilan, atau berpartisipasi dalam masyarakat menjadi sangat terbatas. Praktik ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup mereka secara langsung, tetapi juga mempersempit kemungkinan untuk keluar dari siklus kemiskinan. Maka dari itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa membatasi hak anak perempuan melalui pernikahan dini berarti juga membatasi potensi pembangunan manusia dalam masyarakat.

Perspektif Ketimpangan Sosial dan Gender

Pernikahan anak juga mencerminkan ketimpangan gender yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat India. Laki-laki cenderung dianggap lebih dominan, sementara perempuan dibentuk untuk tunduk, mengurus rumah tangga, dan dinikahkan sejak dini demi kepentingan keluarga. Ketimpangan ini diperparah oleh anggapan bahwa perempuan adalah tanggungan ekonomi yang harus "dilepaskan" secepat mungkin. Dalam masyarakat seperti ini, anak perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan atas tubuh dan masa depannya sendiri. Situasi ini memperkuat siklus subordinasi perempuan, dan pada akhirnya menghambat kemajuan pembangunan inklusif dan kesetaraan.

Kemiskinan sebagai Pemicu Pernikahan Anak

Dalam konteks ekonomi, kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan tingginya praktik pernikahan dini. Ketika keluarga menghadapi tekanan finansial yang berat, menikahkan anak perempuan sering dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban pengeluaran atau sebagai strategi bertahan hidup. Studi Parmar & Kant (2023) menunjukkan bahwa rumah tangga dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan pernikahan anak. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial juga memperkuat keputusan tersebut. Ironisnya, pernikahan dini justru memperbesar risiko perempuan terjebak dalam siklus kemiskinan antar-generasi, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri secara optimal.

Studi Terdahulu

Sejumlah studi terdahulu memperkuat pandangan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan dan pembangunan sosial. Trinh dan Zhang (2021) mencatat bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan sering mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan sebagai cara mengamankan posisi sosial atau ekonomi mereka. Selama masa pandemi COVID-19, studi Paul dan Mondal (2021) mencatat lonjakan angka pernikahan anak sebagai akibat dari meningkatnya jumlah anak perempuan yang putus sekolah dan kehilangan perlindungan sosial. UNICEF (2021) juga menegaskan bahwa anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko tinggi terhadap kehamilan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan memanfaatkan data numerik dan analisis statistik. Proses dimulai dari kerangka teori dan pendapat para ahli, yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian dan diuji melalui data empiris yang dikumpulkan pada periode 2015 hingga 2020. Penelitian ini menganalisis pengaruh

pernikahan dini dan kemiskinan (variabel independen) terhadap modal manusia (variabel dependen) di India.

Untuk mengukur dampak pernikahan dini dan kemiskinan terhadap modal manusia, digunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini membantu mengidentifikasi apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) dan simultan (uji F), dengan melihat nilai signifikansi (p-value) dan perbandingan nilai hitung terhadap nilai tabel.

Beberapa uji asumsi klasik diterapkan untuk memastikan validitas model, seperti uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, uji multikolinearitas melalui nilai VIF dan Tolerance, serta koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) untuk menilai seberapa besar model menjelaskan variasi dalam modal manusia. Kekuatan hubungan antar variabel diukur melalui koefisien korelasi (R). Kerangka metodologis ini memungkinkan penelitian untuk mengetahui pengaruh baik secara individu maupun bersama dari pernikahan dini dan kemiskinan terhadap modal manusia dalam rentang waktu yang ditentukan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Statistik	Sig.
Human Capital	0.218	0.200
Pernikahan Dini	0.189	0.200
Kemiskinan	0.162	0.200

- Hasil uji normalitas tersebut merupakan nilai Shapiro-Wilk Sig sebesar $0.712 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data Pernikahan Dini berdistribusi Normal. Dengan demikian asumsi Normalitas dalam uji one sample t test sudah terpenuhi.
- Hasil uji normalitas tersebut merupakan nilai Shapiro-Wilk Sig sebesar $0.312 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data Human Capital berdistribusi Normal.
- Hasil uji normalitas tersebut merupakan nilai Shapiro-Wilk Sig sebesar $0.933 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data Kemiskinan berdistribusi Normal. Dengan demikian asumsi Normalitas dalam uji one sample t test sudah terpenuhi.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.078	—	—
	Pernikahan Dini	1.250	0.390	2.565
	Kemiskinan	0.298	0.390	2.565

Berdasarkan Uji Multikolinearitas Nilai VIF $2.565 < 10,00$ dari nilai Toleransi $0.390 > 0.100$ maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	120.348	2	60.174	4,497	0.125
Residual	40.140	16	13.380		
Total	160.488	18			

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa F hitung ($4.497 > t$ tabel (2.776445105)) maka dapat disimpulkan: H_0 ditolak, terdapat pengaruh, dan nilai Sig ($0.125 > 0.05$) : signifikan artinya secara

simultan terdapat pengaruh antara pernikahan dini dan kemiskinan terhadap human capital.

Tabel 4. Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.866	0.750	0.703	3.65785	2.005

Sumber: SPSS

Didapat nilai R : 0.866, terdapat hubungan positif yang lemah antara variable pernikahan dini dan kemiskinan terhadap human capital.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.866	0.750	0.703	3.65785

Didapat nilai R Square : 0.750 : terdapat pengaruh antara variable pernikahan dini dan kemiskinan terhadap human capital. Sebesar 75% terhadap Human capital, dan sisanya 25% dipengaruhi dari variable lain yang tidak diteliti.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	13.07	13.76	—	0.950
Pernikahan Dini	1.250	0.774	0.747	1.61
Kemiskinan	0.299	0.951	0.146	0.315

Persamaan Regresi :

$$Y=B_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+et$$

$$PE=B_0+B_1INV+B_2TK+et$$

$$PE-13.078-1.250INV+0.299TK+et$$

Interpretasi:

- Bo = 13.078: Ketika variabel independen (Pernikahan Dini dan Kemiskinan) bernilai nol, maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 13.078%.
- B1 (Pernikahan Dini) = -1.250: Setiap kenaikan 1 unit pada Pernikahan Dini diperkirakan akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.250%, dengan asumsi variabel lain konstan.
- B2 (Kemiskinan) = 0.299: Setiap kenaikan 1 unit pada Kemiskinan diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yaitu 0.299%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Kesimpulan Hasil Uji

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pernikahan dini dan kemiskinan memengaruhi

pembangunan kualitas sumber daya manusia (human capital) di India, yang dapat menjadi hambatan tersembunyi dalam proses pembangunan ekonomi.

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu, baik pernikahan dini maupun kemiskinan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, sehingga secara terpisah kedua faktor ini belum memiliki pengaruh yang cukup kuat.
- b. Namun, ketika dilihat secara bersamaan, pernikahan dini dan kemiskinan tetap menunjukkan adanya pengaruh terhadap human capital, meskipun tingkat signifikansinya belum memenuhi syarat statistik yang ketat. Ini berarti bahwa keduanya tetap patut diperhatikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
- c. Dari hasil koefisien determinasi, diketahui bahwa 75% perubahan dalam kualitas sumber daya manusia dapat dijelaskan oleh pernikahan dini dan kemiskinan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Nilai korelasi memperlihatkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut terhadap human capital, yang menunjukkan bahwa dinamika antara pernikahan dini dan kemiskinan bisa saling memengaruhi perkembangan kualitas manusia.

PEMBAHASAN

Pengertian Human Capital

Human Capital adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi atau negara, sehingga harus dikelola secara strategis. Pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional. Gary S. Becker, seorang ahli ekonom, melihat teori human capital tidak hanya dipandang sebagai sekadar sumber daya biasa, melainkan asset penting yang mampu memberikan pengembalian (return). Menutupnya, segala bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga manusia dianggap sebagai bentuk investasi bernilai yang akan memberikan dampak positif di masa mendatang.

Korelasi Pernikahan Dini dan Kemiskinan di India

Pernikahan dini di India masih menjadi fenomena yang marak, terutama di daerah pedesaan dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hubungan antara pernikahan dini dan kemiskinan bersifat dua arah: kemiskinan menjadi faktor pendorong utama pernikahan dini, dan pernikahan dini memperkuat siklus kemiskinan yang ada. Keluarga miskin sering menikahkan anak perempuan mereka di usia belia karena akses pendidikan yang terbatas, tekanan sosial, dan beban ekonomi. Pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga dan melindungi kehormatan anak perempuan. Selain itu, semakin muda usia perempuan menikah, semakin kecil biaya mahar yang harus disiapkan, sehingga pernikahan dini dianggap solusi ekonomi jangka pendek. Namun, dampak pernikahan dini sangat negatif. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, tidak memiliki keterampilan kerja, dan akhirnya tidak mandiri secara ekonomi. Mereka menjadi sangat bergantung pada pasangan, baik secara finansial maupun sosial, yang membuat keluarga mereka rentan terhadap kemiskinan jangka panjang. Risiko kehamilan usia muda juga meningkat, yang berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak serta menambah beban ekonomi keluarga. Anak-anak dari pernikahan dini juga sering mengalami keterbatasan akses pendidikan dan gizi yang baik, sehingga kemiskinan antar generasi semakin sulit diputus.

Penurunan Potensi Ekonomi Akibat Keterbatasan Pendidikan

Keterbatasan akses pendidikan di India sangat mempengaruhi potensi ekonomi negara tersebut. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas yang menentukan daya saing bangsa. Namun, banyak anak-anak dari kelompok miskin dan marjinal tidak

dapat mengakses pendidikan yang memadai karena faktor ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah biasanya tumbuh menjadi tenaga kerja kurang terampil yang hanya mampu bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan kondisi kerja buruk. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan menurunkan produktivitas nasional. Selain itu, keterbatasan pendidikan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi karena anak-anak tersebut sulit keluar dari kondisi miskin tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rantai Kemiskinan Antar Generasi di India

Rantai kemiskinan antar generasi di India menggambarkan pola kemiskinan yang diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Kondisi ekonomi dan sosial yang buruk, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi membuat anak-anak dari keluarga miskin tumbuh dengan keterampilan dan pengetahuan terbatas serta peluang kerja rendah. Mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan akhirnya menurunkan kondisi serupa kepada generasi berikutnya.

Dampak jangka panjang dari rantai kemiskinan ini sangat besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi India. Secara sosial, kemiskinan antar generasi memperlebar kesenjangan, memperkuat diskriminasi, dan membatasi mobilitas sosial. Secara ekonomi, produktivitas tenaga kerja rendah, inovasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi melambat karena sebagian besar populasi tidak dapat berkontribusi secara optimal. Selain itu, kemiskinan antar generasi memperburuk masalah kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial yang menghambat pembangunan berkelanjutan.

Kemiskinan di India, khususnya di pedesaan, sangat dipengaruhi oleh pembangunan yang tidak merata dan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 70% penduduk miskin tinggal di pedesaan dengan akses pendidikan dan peluang ekonomi yang sangat terbatas. Rendahnya pendidikan menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja sejak dini, menikah muda, atau putus sekolah, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan dan Produktivitas

Pernikahan dini membawa dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan dan produktivitas perempuan, terutama yang masih berusia remaja. Salah satu dampak paling nyata adalah risiko kehamilan pada usia yang belum siap secara fisik dan psikologis. Tubuh remaja perempuan yang belum matang berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklampsia, eklampsia, persalinan prematur, serta kematian ibu dan bayi. Bayi yang lahir dari ibu muda juga lebih berisiko mengalami berat badan lahir rendah dan kematian neonatal.

Tabel 7. Jumlah Pernikahan Dini di India Berdasarkan Negara Bagian

No.	Negara Bagian	Sensus India 2001 (%)	Jumlah	Sensus India 2011 (%)	Jumlah
1	Uttar Pradesh	40.5	31.427.024	7.6	16.072.083
2	Bihar	45.3	20.721.647	23.0	11.148.559
3	West Bengal	57.3	11.387.700	33.6	8.600.385
4	Rajasthan	51.2	11.217.867	35.4	8.417.105
5	Madhya Pradesh	49.2	12.525.668	22.5	6.885.036
6	Maharashtra	19.6	7.005.913	12.3	4.817.160
7	Jharkhand	42.4	2.958.908	20.3	2.086.802
8	Andhra Pradesh	48.2	5.035.901	29.3	2.065.911
9	Karnataka	26.6	2.684.274	16.2	2.008.144
10	Assam	24.5	1.602.804	11.7	1.086.311
11	Gujarat	16.4	1.580.374	7.6	1.024.512
12	Odisha	26.1	2.126.229	13.2	1.002.054

No.	Negara Bagian	Sensus India 2001 (%)	Jumlah	Sensus India 2011 (%)	Jumlah
13	Chhattisgarh	22.5	1.252.533	14.1	881.659
14	Tamil Nadu	14.7	2.775.574	7.1	1.239.220
15	Haryana	18.6	1.075.933	9.0	1.010.755
16	Kerala	10.7	944.667	5.4	614.163
17	Delhi	8.3	802.392	4.3	399.880
18	Punjab	14.7	793.086	6.6	398.204
19	Jammu dan Kashmir	8.7	456.998	3.3	170.106
20	Uttarakhand	16.9	405.124	9.2	273.643
21	Tripura	26.8	345.194	21.5	273.210
22	Meghalaya	16.3	160.965	17.0	223.408
23	Himachal Pradesh	13.5	139.047	6.3	85.625
24	Arunachal Pradesh	23.7	78.428	11.7	60.124
25	Nagaland	11.1	109.788	6.9	62.474
26	Manipur	7.3	49.088	3.7	24.015
27	Sikkim	10.7	30.893	7.2	17.352
28	Mizoram	11.6	33.774	7.7	14.355
29	Goa	5.6	22.474	3.2	12.952

Kumar, S. (2016). *Measuring Child Marriage from Census and Large Scale Data Systems in India*. *Demography India*, Vol.45, Issue: 1&2, pp: 59-76 (Kumar, 2016).

Data tersebut mengindikasikan adanya perubahan proporsi pernikahan anak di berbagai negara. Meskipun mengalami pergeseran angka pernikahan anak, namun sensus 2011 masih menunjukkan angka pernikahan anak memiliki jumlah yang besar.

Bayi yang lahir dari ibu muda juga lebih berisiko mengalami berat badan lahir rendah dan kematian neonatal. Dari sisi kesehatan mental, perempuan menikah dini lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, stres pascatrauma (PTSD), dan rendahnya kepercayaan diri. Tekanan untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu di usia muda membuat mereka kehilangan masa remaja yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan pengembangan diri. Hubungan kuasa yang timpang dalam rumah tangga juga meningkatkan risiko kekerasan domestik dan membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka sendiri.

Dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini juga sangat signifikan. Perempuan yang menikah dini biasanya harus putus sekolah dan kehilangan kesempatan memperoleh keterampilan kerja, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan layak dengan penghasilan memadai. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi karena perempuan tidak hanya kehilangan potensi ekonominya, tetapi juga kesulitan menyediakan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak mereka. Selain itu, biaya kesehatan yang meningkat akibat komplikasi kehamilan dan persalinan serta kebutuhan perawatan mental menambah beban ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga miskin. Secara makro, negara dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi menanggung beban ekonomi besar akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dan tingginya biaya layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan pernikahan anak tidak hanya memperbaiki kualitas hidup perempuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas nasional melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pasar kerja formal.

Budaya Lokal dan Sistem Patriarki dalam Mempertahankan Praktik Pernikahan Dini di India

Budaya lokal yang kuat dengan sistem patriarki menjadi faktor utama yang mempertahankan praktik pernikahan dini di India. Dalam banyak masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai tradisi turun-temurun dan cara untuk melindungi kehormatan keluarga. Di wilayah seperti Bihar dan West Bengal, praktik ini masih dianggap wajar bahkan dianjurkan oleh komunitas setempat. Keluarga miskin sering menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda sebagai upaya mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, menikahkan anak perempuan sejak dini juga dipandang sebagai cara menghindari biaya pernikahan yang lebih tinggi jika dilakukan saat anak sudah dewasa. Dalam sistem dowry (mahar), biaya yang harus dikeluarkan dianggap lebih murah bila perempuan menikah di usia muda.

Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada anak perempuan, menjadi salah satu faktor kuat penyebab pernikahan dini. Anak perempuan yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal lebih rentan dinikahkan dini. Sebaliknya, pendidikan yang lebih tinggi dapat menunda usia pernikahan dan membuka peluang hidup yang lebih baik. Norma sosial yang memandang perempuan hanya dari sisi peran domestik- sebagai istri dan ibu-mendorong masyarakat untuk menikahkan anak perempuan sedini mungkin. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga simbol status sosial keluarga. Ketika perempuan dianggap tidak memiliki masa depan di luar pernikahan, maka pernikahan dini dianggap sebagai solusi terbaik.

Wilayah Bihar dan West Bengal sering menjadi studi kasus karena tingginya prevalensi pernikahan dini. Di Bihar, lebih dari 40% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya intervensi pemerintah setempat terhadap praktik tersebut, sehingga siklus pernikahan dini dan kemiskinan sulit diputus tanpa kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh. Pembahasan ini menunjukkan bagaimana interaksi antara kemiskinan, budaya patriarki, rendahnya pendidikan, dan norma sosial yang kaku menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di India, khususnya di daerah pedesaan yang kurang mendapat perhatian pembangunan.

Ketimpangan Gender di India: Akar Masalah dan Dampaknya

Ketimpangan gender di India merupakan masalah kompleks yang berakar kuat dalam struktur sosial dan budaya patriarkal. Perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga akses mereka terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, dan kesempatan kerja sangat terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga dan masyarakat, bukan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, perempuan banyak terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Hambatan bagi perempuan untuk bekerja dan berwirausaha sangat signifikan. Selain diskriminasi di tempat kerja, stereotip gender yang menganggap pekerjaan dan kewirausahaan sebagai ranah laki-laki membatasi peluang perempuan. Akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan bisnis bagi perempuan sangat terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Kekerasan berbasis gender dan ketidakamanan di ruang publik juga menjadi penghalang besar bagi partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan bisnis. Kondisi ini memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan. Pernikahan pada usia muda sering memaksa perempuan meninggalkan pendidikan dan kesempatan kerja demi menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Hal ini menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan dan pengalaman kerja, serta memperkuat ketergantungan ekonomi pada suami atau keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah ekonomi yang memperdalam ketimpangan gender di India.

Secara keseluruhan, ketimpangan gender di India tidak dapat dilihat dari satu aspek saja. Struktur sosial patriarkal, hambatan budaya dan institusional, serta praktik seperti pernikahan dini saling terkait dan memperkuat ketidaksetaraan. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang meliputi reformasi sosial, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perlindungan hukum yang kuat, serta pemberdayaan ekonomi nyata. Tanpa perubahan mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi, ketimpangan gender akan terus berlanjut dan menghambat kemajuan negara secara keseluruhan. Pembahasan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender di India adalah hasil interaksi kompleks antara budaya patriarki, praktik sosial seperti pernikahan dini, dan

hambatan struktural yang membatasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan. Upaya pengentasan ketimpangan gender harus bersifat holistik dan berkelanjutan agar dapat menciptakan perubahan nyata bagi perempuan dan masyarakat luas.

Ketimpangan Gender di India: Akar Masalah dan Dampaknya

Ketimpangan gender di India merupakan masalah kompleks yang berakar kuat dalam struktur sosial dan budaya patriarkal. Perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga akses mereka terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, dan kesempatan kerja sangat terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam keluarga dan masyarakat, bukan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, perempuan banyak terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Hambatan bagi perempuan untuk bekerja dan berwirausaha sangat signifikan. Selain diskriminasi di tempat kerja, stereotip gender yang menganggap pekerjaan dan kewirausahaan sebagai ranah laki-laki membatasi peluang perempuan. Akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan bisnis bagi perempuan sangat terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Kekerasan berbasis gender dan ketidakamanan di ruang publik juga menjadi penghalang besar bagi partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan bisnis. Kondisi ini memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan. Pernikahan pada usia muda sering memaksa perempuan meninggalkan pendidikan dan kesempatan kerja demi menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Hal ini menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan dan pengalaman kerja, serta memperkuat ketergantungan ekonomi pada suami atau keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah ekonomi yang memperdalam ketimpangan gender di India.

Secara keseluruhan, ketimpangan gender di India tidak dapat dilihat dari satu aspek saja. Struktur sosial patriarkal, hambatan budaya dan institusional, serta praktik seperti pernikahan dini saling terkait dan memperkuat ketidaksetaraan. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang meliputi reformasi sosial, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perlindungan hukum yang kuat, serta pemberdayaan ekonomi nyata. Tanpa perubahan mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi, ketimpangan gender akan terus berlanjut dan menghambat kemajuan negara secara keseluruhan. Pembahasan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender di India adalah hasil interaksi kompleks antara budaya patriarki, praktik sosial seperti pernikahan dini, dan hambatan struktural yang membatasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan. Upaya pengentasan ketimpangan gender harus bersifat holistik dan berkelanjutan agar dapat menciptakan perubahan nyata bagi perempuan dan masyarakat luas.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Pernikahan dini bukan hanya persoalan pribadi atau keluarga, tetapi juga membawa dampak besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya potensi tenaga kerja produktif, terutama dari kelompok perempuan muda. Ketika seorang anak perempuan menikah di usia remaja, biasanya dia harus berhenti sekolah dan mengambil peran sebagai ibu rumah tangga. Hal ini membuat mereka sulit mengakses pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja formal, sehingga potensi mereka untuk berkontribusi secara ekonomi menjadi sangat terbatas.

Menurut penelitian dari World Bank dan International Center for Research on Women (ICRW), jika pernikahan anak dapat dihilangkan secara global, pendapatan negara-negara berkembang bisa bertambah hingga triliunan dolar. Ini menunjukkan betapa besar potensi ekonomi yang hilang ketika perempuan muda tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara akademik maupun profesional. Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan muda dalam dunia kerja juga berdampak pada rendahnya inovasi, kepemimpinan perempuan, dan aktivitas kewirausahaan yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi modern. Dalam jangka panjang, pernikahan dini menghambat pertumbuhan ekonomi makro. Ketika banyak perempuan keluar dari sistem pendidikan dan dunia kerja karena menikah terlalu muda, akumulasi modal manusia menurun. Hal ini mengurangi produktivitas nasional dan melemahkan daya saing negara di tingkat global. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu muda sering mengalami

masalah kesehatan seperti gizi buruk dan kesulitan mengakses pendidikan, yang menyebabkan siklus kemiskinan dan ketertinggalan sosial ekonomi berulang dari generasi ke generasi.

Pernikahan dini juga menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi negara. Komplikasi medis akibat kehamilan remaja, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kebutuhan intervensi sosial untuk melindungi perempuan muda dari kekerasan dalam rumah tangga memerlukan alokasi anggaran yang besar. Kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi anggaran pembangunan, tetapi juga memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Secara sosial ekonomi, pernikahan dini sering kali menyebabkan keluarga terjebak dalam kemiskinan. Pasangan muda yang menikah dini biasanya belum memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga bergantung pada keluarga atau pasangan. Ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Anak-anak dari keluarga ini juga berisiko mengalami stunting, kurang gizi, dan rendahnya akses pendidikan, yang semuanya berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Strategis Penanggulangan dan Rekomendasi Kebijakan

Upaya menanggulangi pernikahan dini harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan menyentuh berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi akar permasalahan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat sehingga mereka lebih memiliki kesempatan untuk menunda pernikahan dan mengejar cita-cita serta memahami hak-hak mereka dengan lebih baik. Sekolah juga berperan sebagai tempat yang aman bagi remaja, melindungi mereka dari tekanan sosial untuk menikah dini sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Selain itu, penyuluhan dan kampanye sosial yang menasar orang tua, tokoh agama, dan pemimpin adat sangat penting dalam merubah pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa atau bahkan diinginkan; pendekatan ini terbukti efektif dalam menggeser norma sosial dan perilaku kolektif di komunitas. Dari sisi hukum, penguatan regulasi dan penegakan aturan yang melarang pernikahan anak sangat diperlukan, termasuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta memberikan pelatihan kepada aparat hukum dan penyuluh masyarakat agar mereka mampu mencegah dan menindak praktik pernikahan dini secara efektif. Di samping itu, aspek ekonomi juga tidak kalah penting, mengingat kemiskinan sering menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan anak; oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi bagi remaja perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke layanan keuangan, dan bantuan tunai bersyarat, terbukti mampu mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan peluang yang lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mandiri secara ekonomi, seperti yang terlihat dalam program di Malawi. Secara keseluruhan, penanggulangan pernikahan dini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal dengan strategi yang disesuaikan kondisi dan budaya setempat agar hasilnya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Dalam kesimpulan penelitian, peneliti perlu merangkum inti dari hasil yang telah diperoleh secara padat, jelas, dan menyeluruh. Kesimpulan harus disusun berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, sehingga menunjukkan apakah penelitian berhasil menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang diajukan. Kesimpulan memuat poin-poin utama dari temuan penelitian tanpa mengulang data secara rinci, melainkan menekankan makna dan implikasinya. Selain itu, kesimpulan juga sebaiknya menyoroti kontribusi penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta kebaruan dari hasil yang dicapai.

Jika ditemukan halhal yang tidak sesuai harapan atau di luar dugaan, hal tersebut dapat disebutkan secara ringkas sebagai bahan refleksi. Di bagian akhir, disarankan pula untuk menyampaikan saran berdasarkan hasil penelitian, baik saran praktis untuk pihak terkait maupun saran akademis untuk penelitian lanjutan. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya menjadi penutup, tetapi juga memberikan gambaran utuh tentang hasil, makna, dan arah pengembangan lebih lanjut dari penelitian.

REFERENSI

- Basha, C. (2016). Child marriage: Causes, consequences and intervention programmes. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 2(11), 19-24.
- Jiwami, D. J. (2019). Kerjasama Unicef-Unfpa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di in- Dia Tahun 2016-2019. *Jurnal Cahya Mandalika*, 745-758.
- Khan, M. N., Khanam, S. J., Khan, M. M. A., Billah, M. A., & Akter, S. (2024). Exploring the impact of perceived early marriage on women's education and employment in Bangladesh through a mixed-methods study. *Scientific Reports*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-73137-w>
- Kumar, S. (2016). Measuring child marriage from census and large scale data systems in India. *Demography India*, 45(1&2), 59-76. http://demographyindia.in/article_document/17/283115.pdf
- Nath, B. S. (n.d.). " Breaking Barriers : Tackling Child Marriage , Gender Inequality , and Social Injustice in the Labor Market ". 1-12.
- Nawir, F., Farhan, A., & Megarezky, U. (2024). Kualitas sumber daya manusia sebagai aspek fundamental dalam menunjang perekonomian. 4(2), 330-341.
- Nizar, N. I., & Nazir, A. (2020). Faktor Human Capital Pada Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4(1), 52-65. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.103>
- Paul, P. (2020). Child Marriage Among Girls in India: Prevalence, Trends and Socio-Economic Correlates. *Indian Journal of Human Development*, 14(2), 304-319. <https://doi.org/10.1177/0973703020950263>
- Rasmussen, B., Maharaj, N., Karan, A., Symons, J., Selvaraj, S., Kumar, R., Kumnick, M., & Sheehan, P. (2021). Evaluating interventions to reduce child marriage in India. *Journal of Global Health Reports*, 5, 1-15. <https://doi.org/10.29392/001c.23619>
- SHELEMO, A. A. (2023). No Titleبليب. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104-116.
- Tedjo, A. K., Ramadhan, M. D., Dirgantara, M. D., & Bahari, R. A. M. (2021). Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 142. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.13310>
- UNICEF. (2023). Ending Child Marriage, a Profile of Progress in India, 2023 updates. 1-30. <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/>